

Internalisasi Nilai Demokrasi Pancasila Melalui Pembelajaran PPKn Siswa Kelas VII A SMPN 3 Banyuwangi

Vava Ardila Raharjo^{1✉}, Mohammad Sabiq Irwan Hariandi², Arie Ramadhani³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Banyuwangi

¹ vavaardila11@gmail.com, ² irwanhadiandi@gmail.com, ³ arier5774@gmail.com

✉ **Corresponding Author:** vavaardila11@gmail.com

ABSTRACT

Internalizing Pancasila democratic values through Pancasila and Civic Education (PPKn) instruction is a strategic effort to shape students into individuals who are democratic, responsible, and capable of respecting differing opinions. However, some students remain passive during lessons, meaning the process of internalizing democratic values has not yet proceeded optimally. This study aims to describe the process of internalizing Pancasila democratic values through PPKn instruction, identify supporting and inhibiting factors, and describe the teacher's efforts to overcome these obstacles among Class VII A students at SMPN 3 Banyuwangi. The study employs a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the school principal, the PPKn teacher, and Class VII A students. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the internalization of Pancasila democratic values is carried out through participatory instruction that integrates discussion, deliberation, Project-Based Learning (PjBL), Problem-Based Learning (PBL), and contextual learning activities – such as educational visits to the General Elections Commission (KPU) and the Regional House of Representatives (DPRD). Supporting factors include the use of participatory teaching methods, the teacher's role as a facilitator and role model, a supportive school environment, and the cultivation of democratic habits. Inhibiting factors include low self-confidence among some students, the dominance of more active students, a lack of parental support, and the influence of social media. The teacher addresses these obstacles by implementing the "talking stick" strategy, offering appreciation to students, instilling ethics regarding expressing opinions, integrating democratic values into school activities, and utilizing contextual learning. This study makes both theoretical and practical contributions by enriching the body of knowledge regarding the internalization of Pancasila democratic values within PPKn instruction at the junior high school level. From a theoretical perspective, this study confirms that participatory, contextual, and student-centered learning plays a crucial role in the process of internalizing democratic values. Practically, the findings can serve as a reference for teachers, schools, and policymakers in designing more effective Civics Education (PPKn) learning strategies to sustainably strengthen the development of students' democratic character.

Keywords: Pancasila Democracy; Internalization of Values; Civics Education; Democratic Attitude

Artikel Info

Masuk	Revisi	Diterima	Terbit
Juli 07, 2026	Agustus 20, 2026	September 19, 2026	Oktober 10, 2026

PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah bagian penting dari sistem pendidikan nasional karena bertujuan untuk mengembangkan warga negara yang beriman, berakhlak mulia, memiliki karakter kebangsaan, dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat (Makbul, M. 2021).

Pembelajaran PPKn tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga untuk membangun sikap dan keterampilan yang dapat diterapkan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus memasukkan elemen kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga siswa tidak hanya dapat memahami konsep demokrasi secara teoretis tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Sikap dan perilaku siswa sangat dipengaruhi oleh pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Siswa dapat belajar tentang nilai-nilai seperti demokrasi, toleransi, gotong royong, dan semangat kebangsaan melalui pembelajaran PPKn (Khakim, 2025:2). Menurut Matnuh dkk. (2022:39), PPKn tidak hanya menyebarkan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mendidik siswa untuk berperilaku dan berpikir secara demokratis.

Demokrasi, salah satu nilai utama dalam kehidupan berbangsa, memerlukan internalisasi yang terus menerus untuk menjadi bagian dari karakter siswa. Memahami demokrasi tidak cukup untuk internalisasi nilainya. Anda juga harus belajar menghargai perbedaan pendapat, kebebasan yang bertanggung jawab, musyawarah, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan (Sugiyono. 2019). Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia bertanggung jawab untuk mengajarkan demokrasi kepada generasi muda, terutama kepada siswa, menurut Matnuh dkk. (2024:2). Oleh karena itu, pembelajaran PPKn harus dirancang secara partisipatif dengan melibatkan siswa dalam kegiatan seperti diskusi, musyawarah, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Ini akan memastikan bahwa siswa menerima pengalaman belajar yang berharga saat mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi (Jelahun, F. E. 2022).

Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan fase penting dalam pembentukan karakter karena pada tahap ini peserta didik mengalami perkembangan moral, sosial, dan emosional yang pesat sehingga sekolah menjadi lingkungan strategis untuk menanamkan nilai demokrasi melalui pembelajaran PPKn (Ansori dkk., 2025). Guru PPKn berperan sebagai fasilitator dan teladan dalam menginternalisasikan nilai demokrasi Pancasila, yang dapat diperkuat melalui pembiasaan, diskusi kelompok, dan pembelajaran kolaboratif (Okoriza & Supeni, 2023; Ulum dkk., 2025). Namun, berdasarkan observasi awal di SMPN 3 Banyuwangi, masih ditemukan siswa yang kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat, partisipasi diskusi yang belum merata, serta dominasi siswa tertentu dalam pengambilan keputusan kelompok, sehingga menunjukkan bahwa nilai demokrasi belum sepenuhnya terwujud dalam perilaku siswa. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya pembelajaran partisipatif, namun kajian yang secara khusus membahas proses internalisasi nilai demokrasi Pancasila di tingkat SMP masih terbatas, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih mendalam pada siswa kelas VII A SMPN 3 Banyuwangi (Ansori, M. U. A., Indratmuko, J. A., & Maya, H. M., 2025).

SMPN 3 Banyuwangi berusaha untuk mengembangkan pembelajaran PPKn dengan fokus membangun karakter demokratis. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa guru telah menggunakan Project-Based Learning (PjBL) sebagai salah satu pendekatan pembelajaran dalam upaya mereka untuk menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Pengalaman belajar yang diberikan oleh kegiatan diskusi

kelompok, penyelesaian proyek, dan pengambilan keputusan bersama mendorong sikap kerja sama, tanggung jawab, dan kemampuan untuk menghargai pendapat orang lain (Asmanidar., 2021). Karena pembelajaran berpusat pada peserta didik (student-centered), pembelajaran berlangsung lebih aktif dan suasana kelas menjadi lebih interaktif dan kondusif. Namun, ada siswa yang kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat, pasif dalam diskusi, dan bergantung pada teman yang lebih dominan untuk menyelesaikan proyek kelompok. Kondisi ini menunjukkan bahwa siswa belum memahami nilai demokrasi Pancasila secara merata. Oleh karena itu, strategi pembelajaran yang lebih baik diperlukan (Fuadi, S. I., & Nugroho, M. Y. A., 2022).

Menurut penelitian terdahulu, pembelajaran partisipatif terbukti mampu meningkatkan partisipasi dan sikap demokratis peserta didik dalam pembelajaran PPKn (Sania, A. P. 2024). Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan pada efektivitas model pembelajaran terhadap hasil belajar, peningkatan partisipasi siswa, atau penguatan karakter secara umum. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada implementasi model pembelajaran tertentu tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana proses internalisasi nilai demokrasi Pancasila berlangsung, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut, serta strategi guru dalam mengatasi hambatan yang muncul selama pembelajaran (Giawa, L., 2024). Dari sisi metode, sebagian penelitian juga lebih banyak menggunakan pendekatan evaluatif terhadap penerapan model pembelajaran, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengalaman dan perilaku peserta didik dalam menginternalisasikan nilai demokrasi di lingkungan sekolah (Millah, A. S., Arobiah, D., Febriani, E. S., & Ramdhani, E., 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena mengkaji secara menyeluruh proses internalisasi nilai demokrasi Pancasila melalui pembelajaran PPKn dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada siswa kelas VII A SMPN 3 Banyuwangi. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan proses internalisasi nilai demokrasi, tetapi juga menganalisis faktor pendukung, faktor penghambat, serta upaya guru dalam mengatasi hambatan tersebut berdasarkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian mengenai internalisasi nilai demokrasi Pancasila pada jenjang SMP serta kontribusi praktis sebagai bahan pertimbangan bagi guru, sekolah, dan pemangku kebijakan dalam mengembangkan pembelajaran PPKn yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses internalisasi nilai demokrasi Pancasila melalui pembelajaran PPKn, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, serta upaya guru dalam mengatasi hambatan tersebut pada siswa kelas VII A SMPN 3 Banyuwangi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai internalisasi nilai demokrasi Pancasila pada jenjang SMP serta menjadi referensi bagi guru dan sekolah dalam mengembangkan pembelajaran PPKn yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan karakter demokratis peserta didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses internalisasi nilai demokrasi Pancasila melalui pembelajaran PPKn pada siswa kelas VII A SMPN 3 Banyuwangi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena yang terjadi secara alami berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Safarudin dkk. (2023) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap fenomena dan makna yang terkandung di dalamnya, sedangkan Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan kondisi atau fenomena yang terjadi pada subjek penelitian. Informan penelitian terdiri atas 1 kepala sekolah, 1 guru PPKn, dan 10 siswa kelas VII A yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling karena dianggap memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan mendeskripsikan proses internalisasi nilai demokrasi Pancasila, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya guru dalam mengatasi hambatan pembelajaran PPKn.

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Banyuwangi yang beralamat di Jalan Batur No. 300, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Fokus penelitian meliputi proses internalisasi nilai demokrasi Pancasila melalui pembelajaran PPKn, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut, serta upaya guru dalam mengatasi hambatan pada siswa kelas VII A. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan terlibat secara langsung dan memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Informan terdiri atas 1 kepala sekolah, 1 guru PPKn kelas VII A, dan 10 siswa kelas VII A yang dipilih sebagai sumber data utama.

Data primer dan sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru PPKn, dan siswa kelas VII A. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan kepustakaan, yang mencakup berbagai dokumen sekolah, dokumentasi kegiatan, dan perangkat pembelajaran. Untuk mengumpulkan data, observasi, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi digunakan. Untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan metodologi penelitian, metode pengumpulan data merupakan bagian penting dari penelitian, menurut Makbul (2021:9). Observasi digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana PPKn dan praktik demokrasi diajarkan di kelas. Wawancara semiterstruktur dilakukan dengan berpedoman pada instrumen wawancara yang telah dirancang sehingga peneliti dapat memperoleh informasi secara mendalam tentang proses internalisasi nilai demokrasi Pancasila. Dokumentasi melengkapi data dengan foto kegiatan pembelajaran, musyawarah, perangkat pembelajaran, pemilihan ketua kelas, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penerapan nilai demokrasi Pancasila di sekolah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1992) sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2019), yang meliputi kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion drawing/verification). Pada tahap kondensasi

data, hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi, disederhanakan, serta dikelompokkan sesuai fokus penelitian, yaitu proses internalisasi nilai demokrasi Pancasila, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya guru dalam mengatasi hambatan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis agar memudahkan peneliti mengidentifikasi pola, hubungan antar-temuan, dan makna dari data yang diperoleh. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik dan memverifikasi kesimpulan secara berulang berdasarkan seluruh data yang telah dianalisis sehingga diperoleh temuan yang sesuai dengan fokus penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari kepala sekolah, guru PPKn, dan siswa, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga kredibilitas data dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Internalisasi Nilai Demokrasi Pancasila Melalui Pembelajaran PPKn

Hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai demokrasi Pancasila pada siswa kelas VII A SMPN 3 Banyuwangi berlangsung secara bertahap melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Proses tersebut diawali dengan pemberian pemahaman mengenai konsep demokrasi Pancasila, kemudian dilanjutkan melalui pembiasaan sikap demokratis dalam kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah. Berdasarkan hasil observasi, peserta didik terlihat aktif mengikuti diskusi kelompok, musyawarah, presentasi, serta pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning/PJBL) dan pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning/PBL). Dalam kegiatan tersebut, sebagian besar peserta didik mulai berani menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan pendapat, bekerja sama dalam kelompok, dan menerima keputusan bersama (Matnuh, H., Fahlevi, R., Kiptiah, M., & Annisa, F., 2024).

Hasil wawancara dengan guru PPKn menunjukkan bahwa proses internalisasi dilakukan secara bertahap melalui pemberian pemahaman konsep demokrasi, pembiasaan perilaku demokratis, serta pemberian pengalaman belajar secara langsung. Guru menyatakan:

"Saya selalu memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk menyampaikan pendapat melalui diskusi, musyawarah, dan presentasi. Meskipun masih ada siswa yang malu, mereka terus didorong agar berani berbicara dan menghargai pendapat teman."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah seorang siswa yang menyampaikan:

"Sekarang saya lebih berani menyampaikan pendapat saat diskusi karena guru selalu memberi kesempatan kepada semua siswa untuk berbicara."

Selain hasil observasi dan wawancara, dokumentasi penelitian juga menunjukkan adanya berbagai kegiatan yang mendukung internalisasi nilai demokrasi Pancasila, seperti foto kegiatan diskusi kelompok, presentasi, pemilihan ketua kelas, e-voting pengurus OSIS, serta kunjungan edukatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dokumentasi tersebut

memperlihatkan bahwa peserta didik memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan nilai demokrasi melalui kegiatan pembelajaran maupun aktivitas sekolah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai demokrasi Pancasila tidak hanya berlangsung pada aspek pengetahuan, tetapi juga tercermin dalam sikap dan perilaku peserta didik. Hal ini terlihat dari meningkatnya keberanian menyampaikan pendapat, kemampuan bekerja sama, sikap menghargai perbedaan, tanggung jawab terhadap keputusan bersama, serta partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sekolah. Temuan ini sejalan dengan teori Berger dan Luckmann (1966) yang menyatakan bahwa internalisasi merupakan proses penyerapan nilai melalui pengalaman sosial hingga menjadi bagian dari sikap dan perilaku individu. Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Muhaimin (2021) yang menjelaskan bahwa internalisasi nilai berlangsung melalui tahapan transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi sehingga nilai yang diajarkan dapat menjadi bagian dari kepribadian peserta didik (Nuryana, A., Pawito, P., & Utari, P., 2019).

Pelaksanaan pembelajaran didukung oleh penerapan model pembelajaran aktif, seperti diskusi kelompok, musyawarah, debat edukatif, Project Based Learning (PJBL), dan Problem Based Learning (PBL). Model pembelajaran tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir kritis, berkomunikasi, bekerja sama, dan memecahkan masalah secara demokratis. Temuan ini sejalan dengan pendapat Arends (2012) yang menyatakan bahwa PBL mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kerja sama, dan partisipasi aktif peserta didik melalui pengalaman belajar yang bermakna.

Hasil observasi menunjukkan bahwa praktik pembelajaran partisipatif meningkatkan sikap demokratis siswa. Sebagian besar siswa mulai menunjukkan keberanian dalam menyampaikan pendapat, bekerja sama dalam kelompok, menghargai pendapat teman, dan membuat keputusan bersama berdasarkan musyawarah. Perubahan ini menunjukkan bahwa nilai demokrasi telah diinternalisasi secara afektif dan psikomotorik melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten selama proses pembelajaran.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian Internalisasi Nilai Demokrasi Pancasila melalui Pembelajaran PKn

Aspek Internalisasi	Kegiatan Pembelajaran	Nilai yang Ditanamkan	Bukti Temuan	Faktor
Pemahaman Demokrasi	Penyampaian Materi PPKn	Demokrasi Pancasila	Observasi, Wawancara guru	Pendukung
Partisipasi siswa	Diskusi PJBL dan PBL	Keberanian berpendapat, Kerja Sama	Observasi dan dokumentasi	Pendukung
Musyawarah	Pengambilan Keputusan	Tanggung jawab, menghargai pendapat	Wawancara siswa	Pendukung
Demokrasi sekolah	<i>e-voting</i> OSIS, pemilihan ketua OSIS	Partisipasi dan tanggung jawab	Dokumentasi	Pendukung

Hambatan	Diskusi Kelas	Kepercayaan diri rendah, dominasi siswa aktif	Wawancara guru dan siswa	Penghambat
Strategi guru	Talking stick, penguatan positif, pembelajaran kontekstual	Peningkatan partisipasi siswa	Observasi dan wawancara	Solusi

Proses internalisasi nilai-nilai demokrasi Pancasila juga diperkuat melalui budaya sekolah yang mendukung demokrasi. Hasil wawancara yang dilakukan oleh sekolah menunjukkan bahwa siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang memberikan pengalaman demokratis secara langsung. Kegiatan ini termasuk kegiatan kokurikuler, pembentukan duta sekolah, pemilihan ketua kelas dan pengurus OSIS menggunakan sistem e-voting, serta pembelajaran kontekstual melalui observasi lapangan dan kunjungan ke lembaga pemerintahan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kegiatan ini memberi peserta didik kesempatan untuk mempelajari praktik demokrasi secara langsung. Ini membantu mereka memahami nilai demokrasi sebagai pengalaman sosial dan sebagai materi pelajaran (Putri, F. W., & Dewi, D. A., 2023).

Temuan tersebut sejalan dengan gagasan John Dewey (1916) bahwa sekolah adalah miniatur masyarakat demokratis yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi melalui berbagai aktivitas sosial yang diadakan di sekolah. Melalui partisipasi dalam kegiatan organisasi, musyawarah, dan pengambilan keputusan, siswa belajar tentang pentingnya partisipasi, tanggung jawab, toleransi, dan penghormatan terhadap hak orang lain dalam kehidupan demokratis (Saetban, A. A., 2020).

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Muhammad Syahrul Rachman (2025) yang menunjukkan bahwa nilai demokrasi Pancasila diinternalisasi dalam pembelajaran PPKn melalui pembelajaran partisipatif, pembiasaan sikap demokratis, dukungan dari guru, sekolah, orang tua, dan lingkungan. Kesamaan ini terlihat dalam penggunaan pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, musyawarah, dan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pendidikan. Selain itu, temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Wewen Darmawan dkk. (2024:105–114), yang menemukan bahwa kegiatan demokrasi di sekolah, seperti pemilihan pengurus organisasi siswa, dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pengambilan keputusan dan memberi mereka pengalaman hidup tentang pelaksanaan demokrasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar siswa melihat demokrasi sebagai kebebasan berbicara dan tanggung jawab atas hak orang lain. Setelah mengikuti pembelajaran PPKn yang melibatkan diskusi kelompok, musyawarah, dan presentasi hasil kerja, peserta didik juga lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Pengalaman ini membantu siswa memahami bahwa setiap pendapat memiliki nilai yang sama selama disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab dan santun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi telah mulai diinternalisasi, memengaruhi perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Selama pendidikan, siswa mempelajari nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan

berpendapat, musyawarah untuk mencapai konsensus, kerja sama, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Nilai-nilai ini tercermin dalam aktivitas kelompok seperti diskusi, pembagian tugas, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan di mana seluruh kelompok berpartisipasi. Melalui pengalaman ini, siswa belajar bahwa demokrasi tidak hanya melibatkan hak untuk menyuarakan pendapat, tetapi juga kewajiban untuk mengutamakan kepentingan bersama dan menghormati pendapat orang lain.



Grafik 1. Hasil Wawancara Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai demokrasi Pancasila telah diterapkan dalam pembelajaran PPKn melalui berbagai aktivitas yang melibatkan partisipasi aktif siswa di kelas VII A SMPN 3 Banyuwangi. Berdasarkan hasil observasi, siswa mulai menunjukkan sikap saling menghargai ketika berdiskusi, memberikan kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat, serta menerima perbedaan pandangan tanpa memaksakan kehendak. Hasil wawancara dengan guru PPKn juga menunjukkan bahwa guru selalu membiasakan siswa menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah dan mendorong seluruh siswa agar terlibat dalam pengambilan keputusan bersama. Temuan tersebut diperkuat oleh dokumentasi kegiatan diskusi kelompok, presentasi, pemilihan ketua kelas, e-voting pengurus OSIS, serta kunjungan edukatif ke KPU dan DPRD yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi (Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N., 2023).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan nilai demokrasi Pancasila dalam pembelajaran PPKn berkaitan dengan implementasi sila kedua dan sila keempat Pancasila. Sila kedua tercermin dalam sikap saling menghormati,

menghargai martabat sesama, serta menerima perbedaan pendapat selama proses pembelajaran. Sementara itu, sila keempat diwujudkan melalui kegiatan musyawarah, pengambilan keputusan bersama, dan partisipasi aktif siswa dalam berbagai kegiatan demokratis di sekolah. Temuan ini sejalan dengan pendapat Soeharso (2023:24–27) yang menjelaskan bahwa implementasi sila kedua menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, sedangkan sila keempat diwujudkan melalui musyawarah, penghargaan terhadap pendapat orang lain, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan yang bijaksana.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas VII A SMPN 3 Banyuwangi telah internalisasi dengan baik nilai demokrasi Pancasila melalui pembelajaran PPKn yang menerapkan model pembelajaran aktif, praktik sikap demokratis, dan budaya sekolah yang mendukung praktik demokrasi. Selain meningkatkan pemahaman teoretis siswa tentang demokrasi Pancasila, pembelajaran praktek kelas (PPKn) telah membantu siswa membentuk sikap demokratis dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, pembelajaran PPKn telah berfungsi sebagai sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi Pancasila kepada siswa sehingga mereka dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka di masyarakat dan di sekolah (Wulansari, F., Nurdin, E. S., & Ruyadi, Y., 2025)

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Internalisasi Nilai Demokrasi Pancasila Melalui Pembelajaran PPKn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas VII A SMPN 3 Banyuwangi telah internalisasi nilai demokrasi Pancasila dengan baik. Berbagai faktor pendukung dan penghambat, termasuk guru, siswa, keluarga, dan lingkungan sosial, berkontribusi pada keberhasilan penanaman nilai demokrasi melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Penggunaan pendekatan pembelajaran yang partisipatif merupakan komponen pendukung pertama. Berbagai model pembelajaran aktif, seperti diskusi kelompok, musyawarah, debat edukatif, Project Based Learning (PJBL), dan Problem Based Learning (PBL), digunakan oleh guru berdasarkan temuan wawancara dan observasi. Dengan model pembelajaran ini, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis tentang demokrasi, tetapi mereka juga memiliki kesempatan untuk bekerja sama, menyelesaikan masalah, mengemukakan pendapat, dan menghargai perbedaan pendapat di kelompok. Mereka juga memiliki kesempatan langsung untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi selama proses belajar mereka.

Hasil tersebut sesuai dengan pendapat Arends (2012:398–399) yang menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah menempatkan siswa di pusat pembelajaran melalui penelitian, diskusi, kerja sama, dan pemecahan masalah. Pada bagian pembelajaran ini, siswa diberi kesempatan untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat, menghargai pendapat orang lain, dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Muhammad Syahrul Rachman (2025:29–30), yang menunjukkan bahwa salah satu faktor utama keberhasilan internalisasi nilai demokrasi Pancasila adalah pembelajaran partisipatif. Ini karena siswa memiliki kesempatan langsung untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah.

Peran guru sebagai fasilitator, pembimbing, dan teladan adalah faktor pendukung berikutnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru tidak hanya

memberikan pelajaran tentang demokrasi Pancasila, tetapi juga memberi semua siswa kesempatan yang sama untuk bertanya, memberikan pendapat, berbicara, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memperlakukan semua siswa secara adil tanpa membedakan mereka berdasarkan latar belakang atau kemampuan, guru menciptakan suasana kelas yang demokratis (Daruhadi, G., & Sopiati, P., 2024).

Hasil ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann (1966) bahwa internalisasi nilai terjadi secara alami dalam interaksi sosial, sehingga nilai tersebut menjadi bagian dari sikap dan perilaku individu. Interaksi antara guru dan siswa dalam penelitian ini adalah cara utama untuk menanamkan nilai demokrasi melalui keteladanan, pembiasaan, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi secara aktif. Penelitian Muhammad Syahrul Rachman (2025:29–30) juga mendukung hasil penelitian ini dengan menyatakan bahwa guru memiliki peran penting sebagai fasilitator dan teladan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang demokratis sehingga siswa dapat mengembangkan sikap yang menghargai pendapat, bekerja sama, dan bertanggung jawab.

Selain pendidik, lingkungan sekolah memainkan peran penting dalam proses asimilasi nilai-nilai demokrasi Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMPN 3 Banyuwangi menawarkan berbagai program sekolah yang memberikan peserta didik pengalaman demokratis seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan pengurus OSIS melalui sistem e-voting, pembentukan duta sekolah, kegiatan kokurikuler, dan pembelajaran kontekstual melalui observasi lapangan dan kunjungan ke lembaga pemerintahan. Peserta didik memiliki kesempatan untuk mempraktikkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, musyawarah, keterlibatan, dan penghargaan terhadap keputusan bersama dalam program-program ini.

Hasil tersebut sejalan dengan pendapat John Dewey (1916) bahwa sekolah adalah miniatur masyarakat demokratis yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar tentang demokrasi dan mempraktikkannya melalui berbagai aktivitas sosial. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Muhammad Syahrul Rachman (2025:29–30), keberhasilan internalisasi nilai demokrasi oleh siswa dipengaruhi bukan hanya oleh pembelajaran di kelas tetapi juga oleh budaya yang mendukung sekolah, yang memungkinkan siswa melakukan praktik demokrasi secara langsung.

Pembiasaan praktik demokrasi di sekolah juga merupakan faktor pendukung. Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa dibiasakan untuk berbicara dengan sopan, menghargai pendapat yang berbeda, bekerja sama, menerima hasil musyawarah, dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Penipuan demokrasi menjadi kebiasaan bagi siswa karena dilakukan secara teratur di kelas dan di sekolah.

Namun, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa ada sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi bagaimana nilai-nilai demokrasi Pancasila diinternalisasi. Hambatan pertama adalah sebagian besar siswa masih tidak percaya diri dalam menyampaikan pendapat mereka. Menurut hasil wawancara, beberapa siswa masih merasa malu atau tidak percaya diri ketika diminta berbicara di depan kelas. Akibatnya, peserta didik tidak terlibat secara merata dalam diskusi, sehingga beberapa dari mereka cenderung hanya mengikuti pendapat teman mereka tanpa menyumbangkan ide mereka sendiri.

Penelitian Debby Sasmita Dian Firera (2025:33) mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa salah satu hambatan dalam internalisasi nilai demokrasi melalui pembelajaran PPKn adalah kurangnya kepercayaan diri siswa. Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Achmad Muthali'in (2024:34), guru harus memberikan motivasi dan pendekatan individu untuk meningkatkan keberanian siswa untuk menyuarakan pendapat mereka selama proses pembelajaran. Tingkat efikasi diri rendah cenderung menghindari situasi yang menuntut partisipasi aktif, menurut Bandura (1997).

Hambatan berikutnya adalah dominasi peserta didik yang lebih aktif dalam kegiatan diskusi. Penelitian menunjukkan bahwa peserta didik dengan kemampuan komunikasi yang lebih baik cenderung mendominasi jalannya diskusi, mengurangi peluang peserta didik lain untuk berpartisipasi. Kondisi ini membuat pengalaman demokratis yang seharusnya dimiliki oleh semua siswa tidak merata.

Teori pendidikan demokratis John Dewey (1916) yang menekankan bahwa setiap siswa harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran sesuai dengan temuan tersebut. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Debby Sasmita Dian Firera (2025:33) dan Achmad Muthali'in (2024:34) yang menunjukkan bahwa dominasi diskusi oleh sebagian siswa dapat menghambat perkembangan karakter demokratis. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh siswa dapat menghambat perkembangan karakter demokratis.

Keluarga juga menjadi penghalang. Hasil wawancara dengan guru menunjukkan bahwa beberapa orang tua belum memberikan perhatian yang cukup untuk membangun karakter demokratis anak mereka di rumah. Karena kurangnya komunikasi antara keluarga dan sekolah, nilai-nilai demokrasi yang telah diterapkan di sekolah belum sepenuhnya diterapkan di lingkungan keluarga.

Hasil ini sejalan dengan teori Berger dan Luckmann (1966), yang menyatakan bahwa proses internalisasi nilai terjadi melalui berbagai lingkungan sosial yang memengaruhi perkembangan individu. Oleh karena itu, internalisasi nilai demokrasi tidak hanya bergantung pada sekolah; keluarga juga harus menawarkan dukungan sebagai lingkungan pendidikan utama. Penelitian Muhammad Syahrul Rachman (2025:29–30) juga menunjukkan bahwa dukungan orang tua menjadi salah satu komponen penting dalam keberhasilan pembentukan karakter demokratis peserta didik.

Selain faktor keluarga, pertumbuhan media sosial juga menantang internalisasi prinsip demokrasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa siswa masih kesulitan membedakan kebenaran dari kebohongan. Kondisi ini berdampak pada kemampuan siswa untuk memahami demokrasi secara kritis dan bertanggung jawab. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Linton Naibaho dkk. (2024:5439) yang mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk mengajarkan siswa berpikir kritis, memahami media, dan menyaring informasi di era digital. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus terus mengajarkan siswa berpikir kritis agar mereka mampu menghadapi tantangan demokrasi di era digital.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas VII A SMPN 3 Banyuwangi internalisasi nilai demokrasi Pancasila secara seimbang. Proses

internalisasi nilai diperkuat oleh metode pembelajaran partisipatif, peran guru sebagai fasilitator, budaya sekolah yang demokratis, dan pembiasaan sikap demokratis. Sebaliknya, masalah seperti ketidakpercayaan diri siswa, dominasi siswa yang lebih aktif, kurangnya dukungan orang tua, dan pengaruh media sosial harus diatasi. Oleh karena itu, guru, sekolah, keluarga, dan siswa harus bekerja sama untuk memastikan proses internalisasi nilai-nilai demokrasi Pancasila berjalan lancar dan menghasilkan siswa yang berkarakter demokratis yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Upaya Guru dalam Mengatasi Hambatan Internalisasi Nilai Demokrasi Pancasila Melalui Pembelajaran PPKn

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi berbagai hambatan selama proses internalisasi nilai demokrasi Pancasila pada siswa kelas VII A SMPN 3 Banyuwangi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, guru tidak hanya menyampaikan materi tentang demokrasi Pancasila, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang mendorong siswa untuk berani menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, bekerja sama, dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan pembelajaran. Berbagai strategi diterapkan secara konsisten, seperti penggunaan talking stick, diskusi kelompok, musyawarah, pemberian apresiasi kepada siswa yang aktif, serta pembelajaran kontekstual melalui Project Based Learning (PJBL), Problem Based Learning (PBL), dan kegiatan demokrasi di sekolah.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan internalisasi nilai demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyampaian materi, tetapi juga oleh kemampuan guru menciptakan lingkungan belajar yang memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk mengalami dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi secara langsung. Meskipun masih terdapat siswa yang kurang percaya diri atau cenderung pasif, strategi yang diterapkan guru mampu meningkatkan partisipasi siswa secara bertahap sehingga proses pembelajaran menjadi lebih demokratis. Dengan demikian, guru berperan sebagai fasilitator, teladan, dan penguat budaya demokrasi di lingkungan sekolah.

Temuan tersebut sejalan dengan teori internalisasi Berger dan Luckmann (1966) yang menjelaskan bahwa nilai akan menjadi bagian dari sikap dan perilaku individu apabila diperoleh melalui proses interaksi sosial dan pembiasaan secara terus-menerus. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut tidak hanya menjelaskan proses internalisasi, tetapi juga memperlihatkan bahwa pengalaman belajar yang partisipatif menjadi faktor utama yang memungkinkan siswa mengubah pemahaman tentang demokrasi menjadi perilaku demokratis dalam kehidupan di sekolah.

Selama kegiatan diskusi, guru menggunakan strategi talking stick atau coin bicara untuk mengurangi dominasi siswa yang lebih aktif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk menyampaikan pendapat. Berdasarkan hasil wawancara, hanya siswa yang memegang tongkat atau koin yang diberi kesempatan untuk berbicara, sehingga setiap anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara. Strategi ini membuat diskusi lebih teratur, terlibat, dan demokratis.

Hasil ini sejalan dengan teori internalisasi yang diusulkan oleh Berger dan Luckmann (1966), yang menyatakan bahwa nilai dan norma sosial akan ditanamkan dalam diri seseorang melalui interaksi sosial yang terus-menerus. Strategi talking stick memberikan peserta didik pengalaman langsung dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti hak berbicara yang sama, penghargaan terhadap pendapat orang lain, dan tanggung jawab untuk menyampaikan ide mereka. Selain itu, penelitian Dra. Praptiningsih (2022:31–32) mendukung hasil penelitian ini, yang menyatakan bahwa metode pembelajaran yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa dapat meningkatkan partisipasi siswa, meningkatkan keberanian mereka untuk menyuarakan pendapat mereka, dan membangun sikap demokratis. Agar semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam diskusi, penelitian Achmad Muthali'in (2024:34) menunjukkan bahwa guru harus menggunakan berbagai strategi pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara, guru memberikan penghargaan, motivasi, dan penguatan positif kepada siswa yang berani menyampaikan pendapat di depan kelas, terutama kepada siswa yang sebelumnya cenderung pasif. Strategi tersebut dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa agar lebih aktif dalam diskusi, presentasi, dan kegiatan musyawarah. Hasil observasi menunjukkan bahwa setelah diberikan penguatan, beberapa siswa yang semula enggan berbicara mulai berani mengemukakan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan bersama. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian penguatan positif merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mendukung proses internalisasi nilai demokrasi Pancasila, khususnya dalam menumbuhkan keberanian berpendapat dan meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Temuan ini memperluas hasil penelitian terdahulu yang umumnya menekankan efektivitas pembelajaran partisipatif terhadap peningkatan hasil belajar atau partisipasi siswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan internalisasi nilai demokrasi tidak hanya dipengaruhi oleh penggunaan model pembelajaran, tetapi juga oleh strategi guru dalam memberikan motivasi, apresiasi, dan pembiasaan secara berkelanjutan sehingga nilai demokrasi dapat berkembang menjadi sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil ini sejalan dengan teori Berger dan Luckmann (1966) yang menyatakan bahwa proses internalisasi terjadi melalui pengalaman dan interaksi sosial yang berkelanjutan. Menurut teori ini, nilai yang diterima akan menjadi bagian dari perilaku individu. Salah satu cara untuk mendorong perilaku demokratis adalah dengan memberikan penghargaan kepada guru. Ini mendorong siswa untuk belajar menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Menurut penelitian Achmad Muthali'in (2024:343), pendekatan personal, penghargaan, dan motivasi guru dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa, mendorong mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembelajaran.

Nilai demokrasi dimasukkan ke dalam kegiatan sekolah oleh guru dan siswa selain pelajaran di kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi diterapkan dalam banyak hal, termasuk pemilihan ketua kelas, pengurus OSIS, pembentukan duta sekolah, pembagian tugas piket, kegiatan kokurikuler, dan aktivitas organisasi siswa yang melibatkan musyawarah dan pengambilan keputusan bersama. Melalui

kegiatan ini, siswa memiliki pengalaman langsung dengan menerapkan demokrasi di lingkungan sekolah.

Hasil ini mendukung teori Berger dan Luckmann (1966) bahwa internalisasi nilai akan lebih efektif jika orang mengalami praktik sosial yang mengandung nilai tersebut secara langsung. Sebagai ruang sosial, lingkungan sekolah memungkinkan siswa mengalami pengalaman demokratis dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Muhammad Syahrul Rachman (202529–30), yang menyatakan bahwa pembelajaran di kelas bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi internalisasi nilai-nilai demokrasi Pancasila, tetapi juga budaya sekolah, yang memungkinkan siswa menerapkan nilai-nilai demokrasi secara langsung.

Sebagai bagian dari pendidikan demokrasi, guru juga mengajarkan etika dalam menyampaikan pendapat. Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta didik dibiasakan untuk berbicara dengan sopan, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, serta bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama. Guru menegaskan bahwa kebebasan berpendapat bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi harus disertai dengan penghormatan terhadap hak orang lain dan kesediaan menerima perbedaan pendapat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn tidak hanya berperan dalam meningkatkan pemahaman peserta didik tentang konsep demokrasi, tetapi juga membentuk perilaku demokratis melalui pembiasaan sikap dan pengalaman belajar yang berkelanjutan. Implikasi penelitian ini adalah guru perlu mengintegrasikan pembelajaran partisipatif dan pembiasaan etika berdemokrasi secara konsisten dalam setiap kegiatan pembelajaran agar peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sekolah perlu memperkuat budaya demokrasi melalui berbagai program yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, serta menghargai perbedaan sebagai bagian dari pembentukan karakter demokratis.

Hasil ini sejalan dengan teori Berger dan Luckmann (1966) yang menyatakan bahwa nilai sosial akan ditanamkan dalam perilaku individu melalui pembiasaan yang berkelanjutan. Pelatihan etika berpendapat membantu siswa memahami bahwa demokrasi bukan hanya kebebasan berbicara, tetapi juga tanggung jawab, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Penelitian Ahmad Misbahul Ulum (202332) mendukung hasil penelitian ini dengan menyatakan bahwa pembelajaran PPKn tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keberanian peserta didik dalam menyuarakan pendapat mereka, tetapi juga mengajarkan mereka untuk menjadi demokratis dengan mengajarkan sikap saling menghargai dan bertanggung jawab satu sama lain.

Menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna adalah upaya tambahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru menggunakan pembelajaran observasi lapangan, pembelajaran berbasis proyek, dan kunjungan ke lembaga pemerintahan seperti KPU dan DPR. Peserta didik memiliki pengalaman langsung dengan praktik demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berkat pembelajaran ini. Ini membuat konsep demokrasi lebih mudah dipahami daripada hanya mempelajari teori di kelas.

Hasil ini sesuai dengan teori Berger dan Luckmann (1966), yang mengatakan bahwa pengalaman sosial membantu orang internalisasi nilai. Pengalaman belajar yang bersifat kontekstual memberi siswa kesempatan untuk mengaitkan pelajaran dengan situasi dunia nyata, sehingga nilai-nilai demokrasi lebih mudah dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut penelitian Achmad Muthali'in (2024:32), pembelajaran kontekstual dapat membantu siswa memahami nilai demokrasi karena memberi mereka pengalaman belajar yang lebih nyata dan relevan.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, berbagai upaya yang dilakukan guru menunjukkan komitmen yang kuat dalam membentuk karakter demokratis peserta didik. Mengatasi berbagai hambatan internalisasi nilai demokrasi Pancasila adalah mungkin dengan menggunakan pendekatan pembelajaran partisipatif, memberikan penghargaan kepada siswa, memasukkan nilai demokrasi ke dalam budaya sekolah, dan menggunakan etika berpendapat dan pendekatan pembelajaran kontekstual. Tidak hanya upaya ini meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi, tetapi juga membantu mereka mengembangkan sikap demokratis melalui pengalaman belajar yang berkelanjutan.

Menurut Muhaimin (2021:153), internalisasi nilai adalah proses penanaman nilai melalui pembelajaran, pembiasaan, keteladanan, dan pengalaman langsung sehingga nilai tersebut menjadi bagian dari kepribadian siswa. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat ini. Dalam penelitian ini, guru tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga membantu membuat lingkungan belajar yang demokratis sehingga siswa dapat sepenuhnya memahami nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Oleh karena itu, upaya guru untuk mengatasi kesulitan internalisasi nilai demokrasi Pancasila pada siswa kelas VII A SMPN 3 Banyuwangi telah membantu membangun karakter demokratis siswa. Dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran dan kebiasaan secara teratur, siswa tidak hanya akan memahami demokrasi sebagai konsep teoretis tetapi juga akan mampu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik di rumah, di sekolah, maupun di komunitas mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa untuk internalisasi nilai demokrasi Pancasila dengan sukses, guru, sekolah, keluarga, dan siswa harus bekerja sama untuk memastikan proses pembentukan karakter berlangsung secara berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan pendidikan Pancasila.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa di kelas VII A SMPN 3 Banyuwangi telah internalisasi nilai demokrasi Pancasila dengan baik dalam pelajaran PPKn. Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa telah terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, memiliki sikap demokratis yang ditanamkan, dan melakukan praktik langsung dalam berbagai kegiatan sekolah. Selain memberikan pemahaman teoritis tentang demokrasi, guru juga memberikan pengalaman belajar melalui diskusi kelompok, musyawarah, presentasi, project-based learning (Pjbl), problem-based learning (PBL), debat edukatif, pemilihan ketua kelas, pengurus OSIS, dan kunjungan edukatif ke KPU dan DPR. Kegiatan ini memberi peserta didik kesempatan untuk menjadi berani dalam menyampaikan pendapat mereka, menghargai perbedaan, bertanggung jawab, bekerja sama, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan

keputusan demokratis. Studi ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai terjadi melalui pembelajaran, pembiasaan, dan pengalaman langsung. Penemuan ini sejalan dengan teori internalisasi Berger dan Luckmann (1966), yang menjelaskan bahwa melalui proses internalisasi, nilai dan norma sosial menjadi bagian dari sikap dan perilaku individu.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor pendukung berkontribusi pada keberhasilan internalisasi nilai demokrasi Pancasila. Faktor-faktor ini termasuk penggunaan pendekatan pendidikan yang partisipatif, peran guru sebagai fasilitator dan teladan, dukungan untuk program sekolah yang demokratis, dan penerapan sikap demokratis dalam kehidupan sekolah. Sebaliknya, masih ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan. Ini termasuk siswa yang tidak percaya diri, kurangnya dukungan orang tua, siswa yang lebih aktif terlibat dalam diskusi, dan bagaimana media sosial memengaruhi pemikiran siswa. Namun, guru dan lembaga pendidikan telah melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah ini. Mereka termasuk menggunakan *talking stick* atau koin bicara, memberikan penghargaan kepada siswa yang berani menyuarakan pendapat mereka, memasukkan prinsip demokrasi ke dalam kegiatan sekolah, dan menerapkan pendekatan pembelajaran yang kontekstual. Berdasarkan temuan tersebut, sekolah harus terus memperkuat budaya demokrasi melalui berbagai program yang melibatkan partisipasi aktif siswa. Selain itu, guru harus terus menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif, kontekstual, dan partisipatif, dan terus bekerja sama dengan orang tua untuk membangun karakter siswa. Diharapkan penelitian selanjutnya akan mengeksplorasi cara nilai-nilai demokrasi Pancasila diinternalisasi dalam berbagai konteks sekolah dan jenjang pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana karakter demokratis peserta didik dibentuk.

REFERENSI

- Makbul, M. (2021). *Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian*. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/svu73>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.).
- Jelahun, F. E. (2022). *Aneka teori dan jenis penelitian kualitatif*. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ymzqp>
- AdminPJ. (2023, December 13). *Memahami analisis data deskriptif kualitatif dalam suatu penelitian*. Publish Jurnal. <https://publishjurnal.com/2023/12/13/analisis-data-deskriptif-kualitatif/>
- Sania, A. P. (2024). *Internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter peduli sosial melalui budaya sekolah di SDN Ketawanggede* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uin-malang.ac.id/66343/>
- Ansori, M. U. A., Indratmuko, J. A., & Maya, H. M. (2025). Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MA Sayyidul Quro Jember. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 6(2), 702–710. <https://doi.org/10.55583/jkip.v6i2.1483>

- Asmanidar. (2021). Suluk dan perubahan perilaku sosial salik (Telaah teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann). *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 99–112. <https://doi.org/10.22373/arj.v1i1.9488>
- Fuadi, S. I., & Nugroho, M. Y. A. (2022). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo.
- Giawa, L. (2024). Penanaman nilai demokrasi melalui pembelajaran PPKn di SMP. *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 37–51. <https://doi.org/10.57094/jpkn.v5i2.1770>
- Millah, A. S., Arobiah, D., Febriani, E. S., & Ramdhani, E. (2023). Analisis data dalam penelitian tindakan kelas. *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas*, 1(2).
- Matnuh, H., Fahlevi, R., Kiptiah, M., & Annisa, F. (2024). Internalisasi literasi politik bagi pemilih pemula melalui mata pelajaran PPKn di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(1), 40–52. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v14i1.19469>
- Nuryana, A., Pawito, P., & Utari, P. (2019). Pengantar metode penelitian kepada suatu pengertian yang mendalam mengenai konsep fenomenologi. *Ensains Journal*, 2(1), 19–23. <https://doi.org/10.31848/ensains.v2i1.148>
- Putri, F. W., & Dewi, D. A. (2023). Internalisasi nilai Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 3(1), 28–36. <https://doi.org/10.56393/rhizome.v1i9.250>
- Saetban, A. A. (2020). Internalisasi nilai disiplin melalui "perencanaan" orang tua dalam membentuk karakter baik remaja. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 12(1), 90–98. <https://doi.org/10.37640/jip.v12i1.285>
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1536>
- Wulansari, F., Nurdin, E. S., & Ruyadi, Y. (2025). Penguatan karakter Pancasila melalui keteladanan guru Pendidikan Kewarganegaraan. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 35–53. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.736>
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). *Pengumpulan data penelitian*.
- Fauziah, R., & Wandira, K. A. (2025). *Metode pembelajaran aktif dalam PKn SD untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa*.